



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692049/2025**



DS:4025-5420-2805-9315

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 3.733.557.000 ( TIGA MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 3.733.557.000  
Rp. 3.733.557.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.733.557.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 3.733.557.000

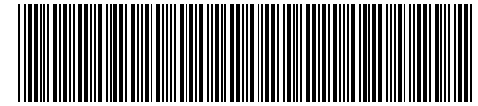
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				3.733.557.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				3.733.557.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan		2.222.843.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan		2.034.523.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	layanan		188.320.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara		34.300.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara		34.300.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9,00	Lembaga		1.476.414.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	9,00	Lembaga		1.476.414.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

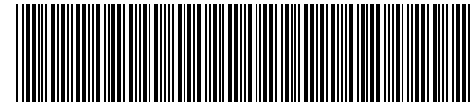
ttd.  
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	3.733.557.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp.
2. PNPB	Rp.	3.733.557.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

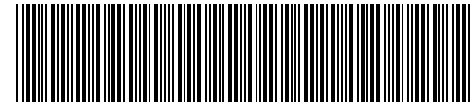
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692049	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	-	3.733.557	-	-	-	3.733.557		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.733.557	-	-	-	3.733.557		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.733.557	-	-	-	3.733.557		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	2.222.843	-	-	-	2.222.843	19 . 51	
04	PNBP	-	2.222.843	-	-	-	2.222.843	136@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	34.300	-	-	-	34.300	19 . 51	
04	PNBP	-	34.300	-	-	-	34.300	136@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	1.476.414	-	-	-	1.476.414	19 . 51	
04	PNBP	-	1.476.414	-	-	-	1.476.414	136@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>3.733.557</b>	-	-	-	<b>3.733.557</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (692049) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

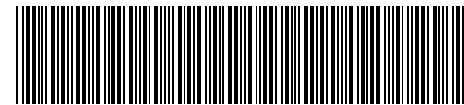
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692049	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	115.326	91.792	75.226	85.246	44.306	12.186	49.286	46.446	14.286	19.886	3.179.571	3.733.557
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	115.326	91.792	75.226	85.246	44.306	12.186	49.286	46.446	14.286	19.886	3.179.571	3.733.557
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	115.326	91.792	75.226	85.246	44.306	12.186	49.286	46.446	14.286	19.886	3.179.571	3.733.557
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	115.326	91.792	75.226	85.246	44.306	12.186	49.286	46.446	14.286	19.886	3.179.571	3.733.557

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [692049] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>692049</b>	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN</b>		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.857.057		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 2.857.057	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
<b>135.04.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.800
<b>7110</b>	<b>Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah</b>		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
<b>7110.BAH</b>	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.848		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 595.180
	Efisiensi Belanja K/L TA.2025		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	<b>7110.BCB</b>	<b>Perkara Hukum Lembaga</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.400		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA.2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.100
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.395	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L TA.2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.840
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.500	<b>7110.BIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>
	Efisiensi Belanja K/L TA.2025		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.241
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Efisiensi Belanja K/L TA.2025	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 506.100
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Efisiensi Belanja K/L TA.2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 789.080		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [692049] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Belanja K/L TA.2025 Rp. 6.700 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Belanja K/L TA.2025 Rp. 280.393 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Belanja K/L TA.2025 Rp. 35.750 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Belanja K/L TA.2025 Rp. 184.730 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692049/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4025-5420-2805-9315

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [692049] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO